

---

**Strategi *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Guna  
Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Meningkatkan  
Kualitas Laporan Keuangan di TNI Angkatan Udara**  
(*The Probity Audit Strategy for Goods and Services Procurement to Ensure Budget  
Accountability in Order to Improve The Quality of Financial Reports in The  
Indonesian Air Forces*)

Dwi Yunanto

[dyunant1997@gmail.com](mailto:dyunant1997@gmail.com)

Universitas Pertahanan,

**Abstrak.** TNI menghadapi tantangan mengelola anggaran negara secara transparan dan akuntabel, terutama di lingkungan TNI AU, masih terjadi penyelewengan anggaran dan pelaporan keuangan yang tidak sesuai standar. Pengadaan barang dan jasa juga sering tidak efektif dan efisien, dengan banyaknya kontrak yang diubah dan masalah transparansi dalam pemilihan penyedia. Probity audit, seharusnya menjadi bagian penting dari pengawasan, belum diterapkan secara optimal karena kurangnya pedoman, auditor berkualifikasi, dan dukungan anggaran yang memadai. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan fenomenologi. Data didapatkan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian mendapatkan bahwa Strategi *Probity Audit* di TNI AU belum dilaksanakan oleh Itjenau karena belum adanya petunjuk, prosedur, dan perencanaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), serta terbatasnya auditor yang berkualifikasi pengadaan barang dan jasa, dan perbedaan pandangan antara pelaksana pengadaan dan APIP. Pengadaan barang dan jasa di TNI AU sudah dilaksanakan sesuai aturan, namun keterbatasan personel menjadi kendala. Akuntabilitas pelaksanaan anggaran TNI AU berjalan optimal, terbukti dengan opini WTP selama enam tahun berturut-turut, kendala dalam penyusunan laporan keuangan karena keterbatasan personel. Laporan keuangan TNI AU disusun menggunakan aplikasi sakti, monsakti, dan OM Span, telah mendapat penilaian baik dari BPK, tetapi membutuhkan perbaikan dalam aspek *Probity Audit* untuk lebih meningkatkan kualitasnya

**Kata kunci:** Probity Audit, Pengadaan Barang dan Jasa, Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran, Laporan Keuangan

**Abstract.** *The Indonesian National Armed Forces faces challenges in managing the state budget transparently and accountably, where budgetary misappropriations and non-standard financial reporting are still occurring. The procurement of goods and services is often ineffective and inefficient, with numerous contract modifications and transparency issues in supplier selection. Probity audit, which should be a crucial part of oversight, has not been optimally implemented due to the lack of guidelines, qualified auditors, and adequate budgetary support. This study employs a qualitative research method with a phenomenological approach. Data were collected through interviews and literature review. The study finds that the Probity Audit Strategy in TNI AU has not been implemented by Itjenau due to the absence of guidelines, procedures, and planning in the Annual Supervision Work Program (PKPT), as well as limited qualified procurement auditors and differing viewpoints between procurement implementers and APIP. Although procurement in TNI AU currently complies with regulations, personnel limitations are a challenge. The accountability of TNI AU's budget implementation has been optimal, as evidenced by a clean audit opinion (WTP) for six consecutive years, despite challenges in financial report preparation due to limited personnel. The financial reports of TNI AU, prepared using Sakti, Monsakti, and OM Span applications, have received favorable evaluations from BPK but still require improvements in Probity Audit aspects to further enhance their quality.*

---

**Keywords:** *Probity Audit, Procurement of Goods and Services, Budget Implementation Accountability, Financial Reports.*

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan anggaran di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Udara (AU), menghadapi tantangan besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data, lebih dari 70% kasus korupsi di Indonesia berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa, yang mencerminkan tingginya potensi penyalahgunaan anggaran di sektor publik. TNI AU, sebagai salah satu elemen strategis dalam pertahanan negara, juga tidak luput dari tantangan ini. Oleh karena itu, penerapan metode pengawasan yang efektif, seperti probity audit, menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip integritas, kejujuran, serta akuntabilitas. *Probity Audit* diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI AU.

Penelitian mengenai *Probity Audit* telah banyak dilakukan, namun penerapannya dalam lingkungan militer, khususnya di TNI AU, masih belum banyak diteliti. Nur Aini Utami (2016), dalam penelitiannya di Kementerian PUPR, menyimpulkan bahwa *Probity Audit* dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dalam pengadaan barang dan jasa. Muslikha (2014) juga menyatakan bahwa penerapan *Probity Audit* di Inspektorat Kabupaten Sleman belum optimal, terutama pada tahap perencanaan, sehingga menyebabkan pengawasan yang kurang efektif. Temuan ini menegaskan bahwa probity audit, ketika diterapkan secara konsisten dan komprehensif, dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Namun, dalam konteks militer, pelaksanaan *Probity Audit* masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus khusus terhadap penerapan *Probity Audit* di lingkungan TNI AU, yang berperan sebagai garda depan dalam menjaga keamanan nasional.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada institusi sipil, penelitian ini akan menganalisis bagaimana *Probity Audit* diterapkan di institusi militer dengan kompleksitas dan dinamika yang berbeda. Dengan melakukan studi ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di TNI AU berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan hasil yang optimal.

Permasalahan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi *Probity Audit* dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan di TNI AU. Fokus penelitian ini dibagi menjadi beberapa pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana strategi *Probity Audit* di TNI AU? (2) Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di TNI AU saat ini? (3) Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan anggaran di TNI AU? (4) Bagaimana *Probity Audit* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di TNI AU? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui pendekatan yang mendalam terhadap sistem pengelolaan anggaran dan mekanisme pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi *Probity Audit* dalam konteks pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU, serta bagaimana penerapannya dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi peningkatan pengawasan anggaran di TNI AU, serta menjadi panduan bagi institusi militer lainnya dalam mengelola keuangan negara dengan lebih akuntabel dan transparan.

## 2. Tinjauan Pustaka

*Original Sin (Classical Realism)*. Teori *Original Sin* dikemukakan oleh Reinhold Niebuhr yang menekankan sifat dasar manusia yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kekuasaan, menyebabkan konflik dan persaingan. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia, termasuk aparatur negara, bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang berpotensi menimbulkan ketidakjujuran dan korupsi. Oleh karena itu, etika dan prinsip kejujuran sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan.

*Probity Audit* adalah proses audit yang bertujuan memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas. Fokus utama *Probity Audit* adalah pencegahan kecurangan dan penilaian efektivitas pengendalian internal. *Probity Audit* juga berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko kecurangan dan memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya negara dalam proses pengadaan. Indikator penting dari *Probity Audit* meliputi pedoman, pembentukan tim, pelaksanaan, dan tindak lanjut audit.

Proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan kompetitif. Efisiensi dalam pengadaan menjadi tujuan utama, dan penting agar pengadaan barang dan jasa mendukung tugas operasional TNI AU dengan integritas yang tinggi. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara optimal untuk kepentingan publik, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI AU.

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban entitas pemerintahan, seperti TNI AU, untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Teori akuntabilitas menekankan pentingnya pelaporan yang jelas, transparan, dan bertanggung jawab terkait penggunaan anggaran negara. Dalam konteks TNI AU, akuntabilitas diukur dari kepatuhan terhadap aturan, efisiensi, efektivitas pencapaian tujuan, dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran.

Integritas merujuk pada kualitas kejujuran dan konsistensi dalam perilaku, yang merupakan dasar penting dalam pelaksanaan tugas aparatur negara. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, integritas diperlukan agar kinerja yang dihasilkan menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang tinggi. Faktor integritas mempengaruhi kinerja pegawai, di mana pegawai yang memiliki integritas tinggi lebih cenderung memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan norma serta prinsip yang benar.

Teori ini menyatakan bahwa desekritisasi adalah penghapusan suatu isu dari ranah keamanan untuk menghindari penggunaan tindakan luar biasa. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, teori ini menekankan pentingnya menjalankan proses pengadaan sesuai aturan tanpa melakukan penyimpangan atau mencari cara untuk membenarkan pelanggaran. Ketaatan pada aturan dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi.

Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh tingkat keandalan dan relevansi informasi yang disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi harus akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, kualitas laporan keuangan TNI AU diukur berdasarkan faktor-faktor tersebut, dengan tujuan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Teori *stewardship* menekankan bahwa manajer atau pengguna anggaran bertindak untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks TNI AU, *Probity Audit* mendukung pemahaman bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan untuk mencapai manfaat yang maksimal bagi organisasi, bukan untuk keuntungan pribadi. Teori ini juga menjelaskan bahwa pengguna anggaran bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan berperilaku sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Teori *Agency*. Teori ini menyatakan adanya hubungan antara prinsipal dan agen, di mana agen bertanggung jawab menjalankan tugas atas nama prinsipal. Dalam pengelolaan keuangan TNI AU,

teori agensi menyoroti pentingnya laporan keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pimpinan organisasi. Laporan yang akurat dan transparan membantu memantau kinerja dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh agen.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada studi kasus yang dilaksanakan di Markas Besar TNI AU. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang terjadi dalam konteks yang spesifik, yaitu pelaksanaan *Probity Audit* pada pengadaan barang dan jasa di TNI AU. Metode deskriptif kualitatif sangat tepat digunakan untuk penelitian ini karena fokus pada deskripsi mendalam tentang realitas dan dinamika yang terjadi di lapangan. Selain itu, studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik dan rinci bagaimana strategi *Probity Audit* diterapkan dalam konteks militer serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang mekanisme dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Probity Audit* di lingkungan TNI AU. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan personel kunci yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan logistik di TNI AU, termasuk personel dari bagian keuangan, logistik, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang rinci mengenai praktik pengadaan barang dan jasa, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas melalui *probity audit*. Selain wawancara, dilakukan juga observasi langsung pada proses pengadaan barang dan jasa di Markas Besar TNI AU untuk melihat penerapan *Probity Audit* secara nyata. Studi dokumen melibatkan peninjauan terhadap dokumen-dokumen terkait seperti laporan pengadaan, audit, dan laporan keuangan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik dan grounded theory. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan tema-tema yang muncul dari data, terutama terkait strategi dan praktik *Probity Audit* serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan di TNI AU. Pendekatan grounded theory digunakan untuk menggali lebih dalam keterkaitan antara *Probity Audit* dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan triangulasi data, peneliti memvalidasi temuan melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas data, serta memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan *Probity Audit* di lingkungan TNI AU. Validasi ini penting untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen resmi terkait pelaksanaan *Probity Audit* di lingkungan TNI AU. Penerapan *Probity Audit* di TNI AU terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hasil wawancara dengan auditor internal di Inspektorat Jenderal TNI AU (Itjenau) dan pejabat pengadaan di Mabesau mengungkapkan bahwa sistem audit ini mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap awal. Auditor secara aktif memantau jalannya pengadaan barang dan jasa guna memastikan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran. Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun *Probity Audit* telah diterapkan, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi untuk memaksimalkan efektivitasnya. Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini

adalah kurangnya kompetensi auditor. Berdasarkan wawancara, auditor internal di Itjenau mengakui bahwa mereka membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam untuk memahami secara komprehensif prinsip-prinsip probity audit. Keterbatasan kompetensi ini menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan audit dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Banyak auditor yang belum memiliki sertifikasi khusus di bidang audit pengadaan barang dan jasa, yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan audit. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan dan sertifikasi perlu menjadi perhatian utama bagi TNI AU. Selain itu, keterbatasan teknologi juga menjadi faktor penghambat efektivitas *Probity Audit* di TNI AU. Berdasarkan pengamatan, sistem pengawasan yang digunakan belum sepenuhnya didukung oleh teknologi informasi yang canggih. Auditor masih mengandalkan pencatatan manual dan proses verifikasi yang memakan waktu, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan hasil audit.

Dengan memanfaatkan teknologi yang lebih modern, seperti sistem audit berbasis elektronik, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Dukungan teknologi yang memadai juga memungkinkan auditor untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap pengadaan barang dan jasa, sehingga potensi kecurangan dapat diminimalkan lebih awal. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan regulasi dan perencanaan yang lebih baik sangat diperlukan. Berdasarkan dokumen yang ditinjau, terdapat ketidakjelasan dalam beberapa aturan terkait dengan pelaksanaan *Probity Audit* di lingkungan TNI AU. Meskipun sudah ada pedoman yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI, aturan tersebut masih perlu disempurnakan untuk mencakup seluruh aspek yang terkait dengan audit pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perencanaan pelaksanaan audit masih belum terintegrasi dengan baik dalam program kerja tahunan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan pelaksanaan audit yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dan regulasi yang jelas untuk menjamin kelancaran dan konsistensi pelaksanaan audit.

Pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas *Probity Audit* dalam meningkatkan akuntabilitas di lingkungan TNI AU. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *Probity Audit* telah memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki proses pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU. Dengan adanya probity audit, potensi penyimpangan dan kecurangan dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga proses pengadaan berjalan lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan audit ini memaksa setiap pelaku pengadaan untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam melaksanakan tugasnya, karena pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, meskipun *Probity Audit* memberikan dampak positif, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kompetensi auditor yang menjalankan audit tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa auditor di lingkungan TNI AU, terutama di Itjenau, masih menghadapi beberapa keterbatasan dalam hal keahlian teknis dan pengalaman dalam melaksanakan audit berbasis probity. Auditor yang kurang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip audit cenderung melewatkan beberapa detail penting, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas audit yang dilakukan. Oleh karena itu, pelatihan yang komprehensif dan sertifikasi profesional bagi auditor sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain kompetensi auditor, dukungan sistem teknologi juga menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas probity audit. Teknologi yang digunakan saat ini di lingkungan TNI AU masih terbatas, dengan proses audit yang banyak dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan efisiensi audit menurun, dan potensi terjadinya kesalahan dalam pengumpulan dan analisis data semakin tinggi. Penggunaan teknologi berbasis sistem informasi yang lebih modern akan memungkinkan auditor untuk melakukan pemantauan real-time terhadap proses pengadaan barang dan jasa, serta memastikan bahwa setiap tahap pengadaan tercatat secara digital, transparan, dan mudah diakses. Ketersediaan data juga menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan *Probity Audit* di TNI AU. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa data yang dibutuhkan untuk audit tidak tersedia secara lengkap atau akurat,

yang menghambat proses audit secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari beberapa personel di bagian pengadaan barang dan jasa mengenai pentingnya pencatatan dan pelaporan yang tepat.

Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan bagi personel di bagian pengadaan juga sangat diperlukan agar mereka memahami pentingnya menyediakan data yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Resistensi dari personel pengadaan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan probity audit. Beberapa personel merasa terganggu dengan adanya pengawasan ketat yang diterapkan melalui probity audit. Mereka cenderung menganggap audit sebagai hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga muncul sikap tidak kooperatif yang mengurangi efektivitas audit. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya *Probity Audit* dalam menjaga integritas dan akuntabilitas, serta bagaimana audit ini dapat membantu meningkatkan kualitas kerja mereka dalam jangka panjang. Jika dibandingkan dengan penerapan *Probity Audit* di institusi lain, seperti Kementerian PUPR, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan audit sangat bergantung pada integrasi sistem informasi yang memadai serta budaya akuntabilitas yang kuat di setiap level organisasi. Di Kementerian PUPR, sistem pengawasan telah dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien, yang belum sepenuhnya terwujud di lingkungan TNI AU. Selain itu, budaya akuntabilitas yang sudah terbangun kuat di Kementerian PUPR memberikan fondasi yang baik bagi pelaksanaan probity audit, sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih transparan. Dalam konteks TNI AU, budaya akuntabilitas ini masih perlu ditingkatkan. Budaya akuntabilitas yang kuat akan mendorong setiap personel untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pimpinan di TNI AU perlu memberikan perhatian lebih dalam membangun dan menguatkan budaya akuntabilitas ini, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun penerapan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

Dari penelitian ini, salah satu temuan utama adalah bahwa *Probity Audit* terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan TNI AU. Dengan adanya probity audit, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini karena *Probity Audit* mampu mendeteksi kesalahan atau penyimpangan sejak awal, sehingga dapat diperbaiki sebelum laporan keuangan disusun. Namun, efektivitas ini masih tergantung pada kompetensi auditor dan dukungan teknologi yang tersedia. Selain itu, *Probity Audit* juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam menekan potensi korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan pengawasan yang ketat, proses pengadaan menjadi lebih transparan dan setiap tahap dapat dipertanggungjawabkan. *Probity Audit* juga memungkinkan identifikasi dini terhadap tindakan-tindakan yang mencurigakan, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi dan keterbukaan data. Dalam hal transparansi, penelitian ini menemukan bahwa belum semua data yang diperlukan dalam proses audit dapat diakses secara terbuka. Beberapa data penting terkait pengadaan barang dan jasa masih disimpan secara manual dan tidak tersedia dalam sistem yang terintegrasi, yang menyulitkan auditor untuk melakukan verifikasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih terbuka dan mudah diakses agar transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dapat terwujud dengan baik.

Kesimpulannya, meskipun *Probity Audit* telah memberikan kontribusi positif, implementasinya di lingkungan TNI AU masih perlu ditingkatkan. Pengembangan kompetensi auditor melalui pelatihan yang lebih intensif, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih, serta penguatan regulasi dan perencanaan audit merupakan langkah-langkah yang harus segera diambil untuk memastikan bahwa *Probity Audit* dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU dapat semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari kajian ini. Pertama, strategi penerapan *Probity Audit* di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Udara (Mabes TNI AU) telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas audit, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta intervensi dari pihak luar. Kedua, pelaksanaan *Probity Audit* masih terbentur oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel yang berkompeten. Kurangnya pelatihan bagi auditor serta minimnya dukungan teknologi memperlambat implementasi yang optimal. Selain itu, data yang tidak akurat dan kurang lengkap juga menjadi penghambat dalam memastikan akuntabilitas penuh di setiap tahapan pengadaan. Ketiga, permasalahan teknis lainnya, seperti kurangnya regulasi yang memadai, juga mengakibatkan *Probity Audit* belum bisa diterapkan secara konsisten. Budaya kepatuhan di lingkungan TNI AU masih perlu diperkuat, di mana resistensi dari personel terhadap audit menambah kompleksitas penerapan audit ini. Kendala teknologi dan keamanan siber juga turut berperan dalam menghambat efektifitas *Probity Audit* di lingkungan militer. Keempat, strategi yang disarankan melibatkan peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan intensif dan peningkatan penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan mempertegas regulasi terkait pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU agar selaras dengan standar internasional dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan *Probity Audit* di lingkungan TNI AU, beberapa rekomendasi telah dirumuskan. Pertama, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memastikan seluruh jajaran di lingkungan TNI AU memahami pentingnya *Probity Audit* dan mendukung pelaksanaannya secara konsisten. Kedua, peningkatan kompetensi auditor melalui program pelatihan yang berkelanjutan sangat krusial, agar auditor memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani audit secara efisien dan akurat. Pemanfaatan teknologi juga perlu diperluas guna mempermudah akses data dan meminimalisir kesalahan manual dalam pengolahan informasi audit.

Ketiga, peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap hasil audit diperlukan, sehingga rekomendasi dari hasil audit dapat segera diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dan memastikan bahwa tindak lanjut dari audit dilakukan dengan tindakan korektif yang sesuai. Keempat, pengembangan budaya transparansi dan akuntabilitas di setiap level organisasi menjadi prioritas, dimana edukasi kepada personel mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur audit harus diintensifkan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, TNI AU diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

- Mochamad, Nasrullah (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). Buku Prosedur: Penelitian Pendidikan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). Selayang Pandang Tentang *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Predana Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Muh Syahru Ramadhan. (2019). Efektivitas *Probity Audit* Dalam Mencegah Kecurangan Penyediaan Barang Dan Jasa. Yogyakarta: Jurnal Akuntansi Paramadina.
- Sangaji, Etta Mamang & Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi

### Jurnal

- Abd hul, Yusuf (2022), Fokus Penelitian Adalah: Pengertian Dan Contoh <https://deepublishstore.com/blog/fokus-penelitian/>, diakses tanggal 23 maret 16.28
- Aisyah 2018, Penerapan Strategi Pembelajaran *Card Sort* Kolaborasi *Small Group Discussion* Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Peraturan Perundang-undangan. Teknodika Jurnal Penelitian Teknologi Pendidikan <https://jurnal.uns.ac.id/Teknodika/article/download/34750/22756> diakses tanggal 25 Maret 2024
- Arif, Abdi (2022). Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan Wolo. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN: 2502-5589.
- Andrew, Renaldo (2021) Analisis Pelaksanaan *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 12 (1), 2021,
- Azikin, Azhar (2021). Evaluasi Pelaksanaan Probity. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng. Jurnal Ada NaGau: Public Administration ISSN: 2723-5505 Volume2 Issue 1 Juni 2021.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). *POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. POWER*, 2(1), 80-86.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Rahayu, R., & Murtinah, T. S. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 4(2), 57–67. Retrieved from <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/512>, diakses tanggal 23 maret 2024
- Wita, Gusmira 2022. Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna Phenomenology in Social Study a Study of Meaning Construction. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora P-ISSN: 2615–3440 Vol. 06, No. 2, Desember 2022. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/titian/article/view/21211> diakses tanggal 24 Maret 2024